



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 216741

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.476.657.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m²/125 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 537.694.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 605 m²/472 m² di SEMARANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.955.475.000
3. Tanah Seluas 31 m² di SEMARANG, WARISAN Rp. 174.375.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 504 m²/370 m² di SEMARANG, WARISAN Rp. 3.268.375.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 306 m²/200 m² di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.540.738.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 301.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 121.110.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	352.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.100.000.000
Sub Total	Rp.	9.350.767.000
III. HUTANG	Rp.	220.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.130.767.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.